



LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI KE PROVINSI MALUKU

TERKAIT PENGAWASAN PENYELENGGARAAN BALAI LATIHAN KERJA

TANGGAL 06 – 08 Feb 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, FEBRUARI 2020**



LAPORAN

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI IX DPR RI KE PROVINSI MALUKU
TERKAIT PENGAWASAN PENYELENGGARAAN BALAI LATIHAN KERJA
DI PROVINSI MALUKU
PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2019-2020
TANGGAL 06 S.D. 08 FEBRUARI 2020**

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat 2 menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang Undang nomor 13 tahun 2003 bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan: (a) memperdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, (b) mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan pembangunan nasional dan daerah, (c) memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan (d) meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Dalam rangka mengimplementasikan amanat Undang-Undang Dasar ini pemerintah merumuskan berbagai kebijakan strategis dalam Rencana Pembangunan diberbagai bidang salah satunya program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas telah menjadi prioritas pemerintah sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 yaitu prioritas industrialisasi dan kesempatan kerja melalui pembangunan Sumber Daya Manusia. Sebagaimana diketahui, berdasar data Global Talent Competitiveness Index 2019, SDM Indonesia berada di peringkat 65 dari 130 negara dan tertinggal dibandingkan Malaysia yang berada di peringkat 33, Thailand di peringkat 40, peringkat 50 diduduki Filipina dan Vietnam di peringkat 64. Sementara di ASEAN, Indonesia menduduki peringkat ke 6 (enam) setelah negara Thailand. Salah satu penyebab ketertinggalan Indonesia karena 58,26 persen pekerja kita merupakan pekerja lulusan SD/SMP dan 74 juta orang (57,27 persen) bekerja pada sector

informal (Data BPS 2019). Selain itu terbatasnya akses kesempatan kerja yang berkualitas kepada kelompok rentan seperti pekerja perempuan, dan penduduk di daerah tertinggal.

Persoalan SDM semakin menjadi perhatian utama bagi pemerintah mengingat kualitas masyarakat dipandang sebagai kunci pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja dan inovasi ke depan. Sejalan dengan itu, arah kebijakan pemerintah yaitu meningkatkan mutu atau kualitas SDM serta pemberian akses pelatihan vokasi bagi angkatan kerja baru atau pencari kerja sehingga menjadi SDM yang unggul dan mampu berdaya saing. Terutama dalam menghadapi era digitalisasi dan revolusi industri 4.0 saat ini, pemerintah dipaksa untuk mempersiapkan SDM yang melek terhadap teknologi digital. Peningkatan kualitas ini diharapkan dapat mendongkrak produktivitas dan daya saing nasional yang secara langsung akan turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dukungan pemerintah pusat dalam program prioritas tersebut melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan telah dialokasikannya anggaran Program peningkatan kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas tahun 2020 sebesar Rp.5,28 Trilyun dengan rincian 50 persen atau Rp.2,63 Trilyun dialokasikan pada program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas, Rp.1,45 Trilyun (27,6 %) diarahkan untuk Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja, Rp.182 Milyar atau 3,46 persen untuk Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan. Pelatihan yang diberikan di BLK baik BLK pemerintah, LPK swasta. BLK Komunitas, training center industry dan lembaga pelatihan di 17 Kementerian/Lembaga. Dari total 305 BLK yang ada, yang merupakan UPTP ada 21 BLK dan sisanya yaitu 284 merupakan UPTD, dengan total instruktur mencapai 2.932 orang.

Program pelatihan ini tidak saja menjadi tanggungjawab pemerintah, namun diharapkan adanya peran swasta dan masyarakat dan perlu ada kolaborasi atau kerjasama guna mewujudkan program tersebut sehingga berhasil mencapai perubahan. Kolaborasi tingkat daerah yaitu disnakertrans, Disdikbud dan disperin, sementara dari sector swasta, perlu kerjasama dengan KADIN, APINDO daerah, Serikat Pekerja, serta Komite Vokasi Daerah. Selain pelatihan dalam program Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki program pelatihan vokasi Indonesia Bekerja yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan BLK dan pihak swasta yang menjadi piloting 2019 yang saat ini dalam fase membangun fondasi dan infrastruktur vokasi.

Provinsi Maluku sendiri dengan jumlah penduduk 1,7 juta jiwa (BPS 2017) struktur ketenagakerjaannya mengalami perubahan dibanding tahun lalu, dimana dari jumlah penduduk 1,74 juta, angkatan kerja berjumlah 707 ribu orang dengan penduduk bekerja mencapai 90 persen dari angkatan kerja yang didominasi pekerja informal yang mencapai 62,8 persen.

Jumlah pengangguran merupakan indikator penting untuk melihat kinerja pembangunan suatu wilayah. Jumlah pengangguran di Maluku tahun 2016-2017 menunjukkan tren yang meningkat yaitu dari 52 ribu meningkat menjadi 65 ribu atau terjadi peningkatan sebesar 24 persen. Sementara tingkat pengangguran terbuka juga terjadi peningkatan sebesar 9,29 persen yang menjadikan provinsi Maluku sebagai provinsi dengan angka pengangguran tertinggi di Indonesia dan menempati urutan keempat secara nasional. Sebagai provinsi kepulauan, maka pembangunan ketenagakerjaan dilakukan dengan pendekatan berbasis gugus pulau dilakukan melalui kegiatan padat karya produktif maupun padat karya infrastruktur untuk penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat, serta terapan teknologi tepat guna bagi masyarakat sehingga menciptakan kesempatan kerja produktif.

Sebagai wakil rakyat, salah satu fungsi DPR yaitu melaksanakan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDN RI) tahun 1945. Komisi IX DPR RI yang memiliki tugas dan ruang lingkup di bidang ketenagakerjaan dan kesehatan melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Maluku. Kunjungan kerja spesifik ini dilaksanakan dalam rangka pengawasan pelaksanaan fungsi dari Balai Latihan Kerja (BLK) dalam upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan sumber daya manusia sebagaimana program prioritas nasional pemerintah pusat yang dilaksanakan di provinsi Maluku.

Komisi IX DPR RI melalui kunjungan kerja spesifik ini diharapkan mendapatkan berbagai informasi dan masukan dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia sebagaimana prioritas pemerintah 2020 sehingga siap menghadapi era gloMalukisasi dan industrialisasi 4.0 dan siap bersaing dengan tenaga kerja asing yang tidak akan dapat terbendung masuk dan bekerja di Indonesia. Temuan dan rekomendasi yang dihasilkan pada kunjungan kerja ini selanjutnya akan disampaikan kepada pihak Pemerintah sebagai masukan dalam melakukan berbagai penyempurnaan dalam upaya pembangunan SDM Indonesia yang terampil dan siap pakai.

II. GAMBARAN UMUM PROVINSI MALUKU

Maluku merupakan salah satu provinsi di kawasan Timur Negara Republik Indonesia yang memiliki posisi strategis, karena kedudukannya berada antara sebagian wilayah Barat dan Tengah Indonesia dengan Papua di bagian Timur, serta menjadi penghubung wilayah Selatan yakni Negara Australia dan Timor Leste dengan wilayah Utara yaitu Maluku Utara dan Sulawesi. Selain itu, Provinsi Maluku berada pada jalur lintas internasional yaitu dilalui oleh 3

(tiga) Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Posisi ini mempunyai arti yang sangat strategis di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi.

Keadaan Geografis

Provinsi Maluku merupakan suatu Provinsi Kepulauan yang terletak di Indonesia bagian timur, terdiri dari 632 pulau. Pulau terbesar adalah Pulau Seram, Pulau Buru, Pulau Yamdena dan Pulau Wetar. Wilayah yang berbentuk kepulauan dengan aksesibilitas dan interaksi yang rendah, mengakibatkan keterpencilan diberbagai daerah. Secara geografis, Provinsi Maluku berbatasan dengan Provinsi Maluku Utara di bagian Utara, Provinsi Papua Barat di bagian Timur, Negara Timor Leste dan Negara Australia di bagian Selatan, serta Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah di bagian Barat. Sedangkan secara astronomi, Provinsi Maluku terletak antara 2o30' – 8o30' LS dan 124o – 135o30' BT. Sebagai daerah kepulauan, Provinsi Maluku memiliki luas wilayah 712.480 Km², terdiri dari sekitar 92,4% lautan dan 7,6% daratan dengan jumlah pulau yang mencapai 1.412 buah pulau dan panjang garis pantai 10.662 Km. Sejak tahun 2008, Provinsi Maluku terdiri atas 9 kabupaten dan 2 kota dengan Kota Ambon sebagai ibukota Provinsi Maluku. Kondisi geografis Provinsi Maluku bila dilihat dari sisi strategis peluang investasi bisnis dapat diprediksi bahwa sumber daya alam di sektor perikanan dan kelautan dapat dijadikan primadona bisnis di Maluku, selain sektor lainnya seperti pertanian sub sektor peternakan dan perkebunan, sektor perdagangan dan sektor pariwisata serta sektor jasa yang seluruhnya memiliki nilai jual dan potensi bisnis yang cukup tinggi.

Iklim

Iklim di Wilayah Kepulauan Maluku dipengaruhi oleh iklim tropis dan iklim musim, yang disebabkan oleh kondisi Kepulauan Maluku yang terdiri dari pulau-pulau dan dikelilingi oleh lautan. Berdasarkan data klimatologi hasil pencatatan Stasiun Meteorologi dan Geofisika di Provinsi Maluku, maka suhu rata-rata di Provinsi Maluku tahun 2008 adalah 26,7oC dengan curah hujan 264,4 mm.

Penduduk dan Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk Provinsi Maluku pada tahun 2009 mencapai 1.457.070 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,14%. Jumlah tersebut mendiami wilayah seluas 54.185 Km², yang tersebar di 9 kabupaten dan 2 kota se Provinsi Maluku dengan kepadatan penduduk 27 jiwa per Km². Dari sisi tenaga kerja, jumlah angkatan kerja di Provinsi Maluku pada tahun 2009 mencapai 596.030 orang, yang bekerja sebanyak 533.015 orang (89,43%) dan sisanya yaitu

10,57% merupakan pencari kerja. Apabila dibedakan menurut lapangan pekerjaan utama, maka persentase terbesar penduduk Provinsi Maluku bekerja pada Sektor Pertanian yaitu sebesar 56,28%, kemudian Sektor Jasa dan Sektor Perdagangan masing-masing sebesar 13,57% dan 12,63%.

Perekonomian

Kondisi perekonomian Provinsi Maluku dalam kurun waktu 2005 – 2009 mengalami pertumbuhan rata-rata 5,18%. Selama kurun waktu tersebut, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku menunjukkan peningkatan secara konsisten. PDRB Provinsi Maluku tahun 2009 atas dasar harga konstan adalah Rp3,99 trilyun. Sektor pertanian merupakan sektor yang dominan dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB Provinsi Maluku selama lima tahun terakhir, dengan nilai kontribusi rata-rata per tahun 32,56%. Perkembangan perekonomian Maluku pada triwulan ke dua tahun 2019 tumbuh positif sebesar 6,09 persen. Angka tersebut, mengalami sedikit pelambatan dibandingkan dengan triwulan ke satu 2019 yang tumbuh sebesar 6,32 persen. Namun, pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan ke dua 2019 masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,05 persen. Pertumbuhan ekonomi Maluku didorong oleh beberapa sektor lapangan usaha yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi antara lain pertanian, perikanan perdagangan dan serta industri pengolahan, sehingga perlu ditingkatkan pertumbuhannya. Sektor unggulan pertanian dan perikanan akan barengi dengan peningkatan nilai tambah produk, industri pengolahan serta peningkatan SDM yang unggul dan terampil.

PETA PROVINSI MALUKU



III. PERMASALAHAN

Era digitalisasi dan industry 4.0 saat ini telah menjadi kamus yang paling sering dibicarakan. Banyak masyarakat yang masih awam atau belum memahami istilah industry 4.0, yaitu masa dimana seluruh system akan terkoneksi atau terintegrasi dengan teknologi digitalisasi. Sebagai negara berkembang, indonesia dipaksa untuk menyiapkan diri dari serbuan tehnologi digital dan sumber daya manusia yang memiliki kualitas. Keadaan ini jelas akan menyingkirkan tenaga kerja yang tidak terampil. Posisi tenaga kerja manusia perlahan-lahan akan digeser dengan tenaga robot. Penggunaan tehnologi 4.0 akan menghilangkan banyak peluang pekerjaan, bahkan prediksi konsultan global McKinsey institute terkait dampak otomatisasi pada 1,2 milyar pekerja secara global. Bagi Indonesia, revolusi industry dapat menjadi ancaman serius melihat kualitas tenaga kerja dimana baru 62 persen dari angkatan kerja yang berhasil menyelesaikan pendidikan sekolah menengah ke bawah. Begitujuga dengan robotisasi yang diperkirakan akan semakin tumbuh setelah 2019, yang akan terus ada 18 juta robot industry yang akan dipasang diseluruh dunia pada 2035 yang akan melakukan pekerjaan setara dengan 100 juta orang. Di ASEAN sendiri otomatisasi sedang terjadi di semua sector. Di Indonesia sendiri data ILO (Gary Rynhart 2017) mencatat pertumbuhan robotisasi paling banyak berdampak pada sector otomotif (43%) dan elektronik (21%). Hal ini jelas berdampak hilangnya kesempatan kerja, peluang kerja baru dan pekerjaan yang akan bergeser pada tenaga kerja mesin.

Pemerintah Indonesia perlu cepat tanggap terhadap perubahan teknologi yang terjadi saat ini, termasuk kesiapan SDM, dan lainnya. Sebab respon yang kurang tepat akan menimbulkan ancaman pada lingkungan pekerjaan yang sudah ada, bahkan jika tidak dapat beradaptasi, akan menghambat usaha dalam mengurangi ketimpangan. Oleh sebab itu pemerintah telah memasukan permasalahan peningkatan kualitas SDM ini dalam program prioritas nasional yang dituangkan dalam beberapa program dan kegiatan di beberapa kementerian dan lembaga. Khusus bagi kementerian ketenagakerjaan, program dan kegiatan yang terkait langsung dengan peningkatan kualitas SDM seperti peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas, termasuk didalamnya program revitalisasi BLK, pelatihan vokasi, BLK maritime dan BLK komunitas, selain itu pelatihan vokasi ada di BPJS Ketenagakerjaan yang bekerjasama dengan BLK pemerintah maupun LPK swasta dalam rangka perluasan kesempatan kerja.

IV. PEMBAHASAN

Tim kunjungan kerja KOMisi IX DPR RI bersama mitra kerja dan para undangan melakukan pertemuan di kantor Dinas tenaga kerja provinsi Maluku. Kepala Dinas Tenaga Kerja provinsi Maluku serta seluruh mitra kerja dan undangan menyampaikan hal-hal terkait upaya peningkatan kualitas SDM melalui peran Balai Latihan Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja di provinsi Maluku. Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.

Paparan Disnaker dan trans provinsi Maluku

Angkatan Kerja provinsi Maluku dan kepesertaan BPJS Ketenagakerja

Berdasarkan data statistic provinsi Maluku tahun 2019 (BPS Maluku 2019), jumlah angkatan kerja yang bekerja yaitu 715.811 orang dengan pengangguran sejumlah 54.575 orang. Dari jumlah angkatan kerja yang bekerja, 274.482 orang merupakan tenaga kerja pada sector formal dan 441.329 orang atau 61,6 persen yang bekerja pada sector informal. Sementara jumlah pekerja yang terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 228.709 orang yang terdiri atas pekerja pada badan usaha sebanyak 139.640 orang, penyelenggaran negara (Non ASN dan aparat desa) berjumlah 9.451 orang, kategori pekerja mandiri sebanyak 15.668 orang, dan pekerja pada jasa konstruksi berjumlah 63.950 orang.

Alokasi anggaran BLK, jumlah peserta pelatihan BLK yang terserap di dunia usaha, serta perusahaan atau mitra usaha yang bekerjasama dengan BLK Ambon

Alokasi anggaran BLK Ambon

Alokasi anggaran pembangunan ketenagakerjaan yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku mengalami kenaikan di tahun 2019 yaitu sebesar Rp.10 Milyar

dari tahun sebelumnya tahun 2018 yaitu berjumlah 2,8 Milyar menjadi Rp.3,8 Milyar. begitupun anggaran Balai Latihan Kerja Ambon terjadi kenaikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir sejak tahun 2017 berjumlah Rp.23,7 Milyar naik menjadi Rp.38,6 Milyar di tahun 2018 menjadi Rp.56,3 Milyar.

Jumlah peserta pelatihan BLK yang terserap di dunia usaha

Adapun jumlah peserta pelatihan pada BLK yang terserap dalam dunia industry di tahun 2017 sebesar 256 dari 832 peserta atau 30,7 persen, tahun 2018, dengan jumlah peserta sebanyak 1.696 peserta, yang terserap di dunia industry mencapai 564 peserta atau 33,25 persen dan untuk tahun 2019, dari jumlah peserta pelatihan sebanyak 4.640, hanya 1.328 orang atau 28,62 persen yang terserap di dunia industry, sementara peserta yang menjadi wirausaha mencapai 1.360 orang atau 29,31 persen di tahun 2019. Dengan ratio perbandingan antara peserta dengan tingkat kelulusan peserta yang diterima bekerja setelah mendapat pelatihan di BLK Ambon yaitu 3:1 dalam 3 (tiga) tahun terakhir sejak tahun 2017 lalu. Dengan peningkatan jumlah anggaran BLK dan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan, namun peningkatan tersebut belum diikuti dengan jumlah instruktur yang tersedia yang belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan pelatihan di BLK Ambon, yang hingga saat ini, masih membutuhkan 45 orang instruktur.

Perusahaan atau mitra usaha dan instansi terkait yang bekerjasama dengan BLK Ambon

Jumlah perusahaan di provinsi Maluku berjumlah 7.019 buah perusahaan, namun baru 42 perusahaan atau 0,6 persen yang telah melakukan MoU dengan BLK. Sementara kerjasama BLK Ambon dengan instansi terkait di Provinsi Maluku melalui pembentukan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan industri yang dibentuk pada tanggal 28 September 2017 di BLK Ambon, yang melibatkan

- a. Asosiasi Industri yang ada di Kota Ambon beserta dengan beberapa instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, Sekolah Menengah Kejuruan yang ada di Kota Ambon, dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (dimana 42 industri tergabung didalamnya).
- b. Pembentukan Skill Development Center (SDC) Maluku dan SDC Kota Ambon yang melibatkan akademisi, industry, instansi pemerintah, dan LPKS (Lembaga Pelatihan Kerja Swasta).
- c. Kerjasama dan MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan dan menunjuk PT. Fuji Bijak Prestasi sebagai penyelenggara pelatihan pra kerja dalam rangka pelatihan pra kerja mempersiapkan Sumber Daya Manusia di Provinsi Maluku untuk masuk dalam dunia kerja.

- d. Pemerintah Provinsi Maluku sedang menjajaki dan dalam proses untuk melakukan kerjasama dengan Perusahaan Petrotekno Technical Scholl, yang adalah salah satu Lembaga Pelatihan Kerja dibidang migas dalam rangka penyiapan SDM Maluku di bidang migas untuk menyambut pengelolaan migas Blok Masela

Kejuruan yang dilakukan pada BLK Ambon

Pelatihan yang dilaksanakan ada 12 kejuruan, yaitu kejuruan TIK, welding, otomotif, listrik, elektronik, manufaktur, bangunan, garmen, refrigeration, pariwisata, pertanian dan processing.

Peran dan kesiapan pemerintah daerah melalui BLK dalam menghadapi revolusi industry 4.0

Dalam menghadapi revolusi industry 4.0, pemerintah daerah melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah, Dinas Nakertrans telah mendorong pemerintah Kabupaten dan Kota untuk membangun BLK dalam rangka menyiapkan SDM di Kabupaten/Kota. Telah terbangun 3 Kantor BLK milik Pemerintah Kabupaten/Kota di Kab. Maluku Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Buru.
2. Meningkatkan fungsi dan peran Forum Kerjasama Jejaring Pemagangan Provinsi Maluku sebagai wadah yang terdiri dari berbagai unsur Pemerintah, Perusahaan, LPK, asosiasi, dan stakeholder dalam rangka memberikan masukan terkait dengan penyelenggaraan pemagangan dalam negeri. FKJP bertugas untuk menjembatani kebutuhan pasar kerja di perusahaan dengan pencari kerja, melalui indentifikasi kebutuhan program pemagangan di perusahaan dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun program, kurikulum dan silabus pemagangan sesuai kebutuhan dunia industry.
3. Menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi melalui kegiatan Pemagangan Dalam Negeri dalam rangka menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi agar mereka lebih mudah terserap di pasar kerja.
4. Meningkatkan fungsi dan peran Komite Akreditasi LPK Provinsi Maluku dalam rangka mengakreditasi setiap LPK yang ada di Provinsi Maluku untuk memastikan LPK yang ada memiliki kualitas yang terkait dengan instruktur, sarana, program, kurikulum dan silabus dalam menyiapkan SDM yang berkompeten.
5. BLK Ambon melaksanakan pelatihan bagi tenaga kerja yang masih gagap teknologi melalui pengenalan teknologi baru, menyediakan fasilitas *wifi* diseluruh workshop atau area BLK dan mengadakan peralatan teknologi terbaru untuk menunjang pelatihan yang masih belum memenuhi standar.

SDM ABK di provinsi Maluku

Sumber Daya Manusia Anak Buah Kapal (ABK) di provinsi Maluku masih sangat terbatas. Jumlah ABK yang terdata sebanyak 394 orang, dengan kualitas SDM ABK yang masih rendah, disebabkan belum adanya Diklat Vokasi dan Diklat Pemberdayaan Masyarakat bagi ABK di provinsi Maluku. Terkait dengan itu, mohon dukungan untuk:

- Pembangunan Sekolah Pelayaran Maluku di Desa Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah (studi perencanaan dan studi lingkungan telah dilaksanakan pada Tahun 2017);
- Surat Kadishub Provinsi Maluku Nomor 552.10/1/2019 tanggal 29 Nopember 2019 tentang Permohonan Pelaksanaan Diklat Pemberdayaan Masyarakat di Maluku Tahun 2020, dengan jenis diklat; BST KLM, SKK 30 Mill untuk 1000 peserta ditujukan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) di Jakarta.

Paparan BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku

Dalam rangka mendukung pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Maluku, BPJAMSOSTEK bersama Pemerintah Provinsi Maluku secara intensif melakukan koordinasi dan kerjasama melalui rapat Kerjasama Operasional (KSO) secara berkala untuk mendukung percepatan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan telah dikeluarkan beberapa regulasi dan kebijakan yang mendukung perluasan kepesertaan diantaranya:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kewajiban Kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Wilayah Pemerintah Provinsi Maluku.
- b. Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Proyek Dan Jasa Konstruksi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- c. Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kepesertaan Pejabat Daerah Serta Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- d. Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Aparatur Desa Se-Provinsi Maluku Dalam Program Jaminan Sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Disamping itu dalam rangka menindaklanjuti regulasi dan kebijakan tersebut telah dilakukan kerjasama dengan beberapa instansi/SKPD terkait diantaranya:

- a. MoU dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku tentang persyaratan kepesertaan BPJAMSOSTEK dalam pemberian pelayanan perizinan di Provinsi Maluku
- b. MoU dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku tentang pembentukan Tim Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu
- c. Mou dengan Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN Ambon dan PPN Tual) tentang persyaratan kepesertaan BPJAMSOSTEK bagi tenaga kerja sektor perikanan dan kelautan.

Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Selain bentuk kerjasama dimaksud, BPJAMSOSTEK bersama Pemerintah Provinsi Maluku melalui Bank BPD Maluku Malut memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi sebagai berikut:

- Perlindungan bagi tenaga kerja rentan (Nelayan) sebanyak 8.250 tenaga kerja melalui program CSR dengan Bank Maluku Malut (2019)
- Perlindungan bagi Pekerja Sosial Keagamaan sebanyak 17.000 tenaga kerja melalui program CSR dengan Bank Maluku Malut (2018)

Peran BPJS TK dalam peningkatan kualitas SDM di provinsi Maluku

Peran serta BPJAMSOSTEK dalam upaya peningkatan kualitas SDM di Provinsi Maluku adalah telah dilaksanakan penandatanganan MoU antara BPJAMSOSTEK Kanwil Sulawesi Maluku dengan Gubernur Provinsi Maluku yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama (PKS) antara Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Maluku dengan BPJAMSOSTEK Cabang Maluku tentang pemberian Pelatihan Pra Kerja Pembinaan Kesiapan Etika Bekerja di Perusahaan bagi putra/putri Maluku dalam rangka mempersiapkan pembukaan Blok Abadi Masela sebanyak 400 peserta yang di dominasi peserta di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Saumlaki) sebanyak 207 peserta.

Alokasi dan realisasi dana pelatihan vokasi oleh BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Maluku

Total realisasi dana vokasi tahun 2019 se-kantor wilayah Sulawesi Maluku sebesar Rp 794.595.563 yang terbagi kepada 5 kantor pelayanan yakni Kantor Cabang Makassar, Manado, Ternate, Palopo dan Sulawesi Barat. Untuk Provinsi Maluku tahun 2019 tidak mendapat target vokasi. Namun pada tahun 2019, telah dilaksanakan Pelatihan Pra Kerja Blok Masela Provinsi Maluku dengan realisasi biaya pelatihan sebesar Rp 880.000.000. (sebagaimana telah dijelaskan di point 2 (dua) di atas).

Tahun 2020, Kantor wilayah Sulawesi Maluku mendapat target 1.530 tenaga kerja untuk program vokasional, dan dipastikan semua kantor cabang di jajaran wilayah Sulawesi Maluku mendapat target vokasi. Untuk saat ini kanwil Sulawesi Maluku menunggu arahan dari Deputi Direktur terkait perihal teknis pelaksanaan vokasi tahun 2020 termasuk untuk wilayah Provinsi Maluku. Kantor Cabang Maluku merupakan salah satu kantor cabang yang menjadi target vokasi BPJAMSOSTEK, untuk program vokasi di Provinsi Maluku akan disesuaikan dengan kondisi pekerja dalam menghadapi era globalisasi/milenial misalkan menyesuaikan modul-modul pelatihan yang dibutuhkan pekerja sesuai budaya dan kondisi daerah di Maluku.

Besaran anggaran Vokasi tahun 2020 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.02/2019 tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2020. Besaran anggaran pelatihan Vokasi tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp.260.000.000.000,- (dua ratus enam puluh miliar rupiah), dan untuk alokasi dana Vokasi tahun 2020 tersebut Kantor Wilayah maupun Kantor Cabang di jajaran Kanwil Sulawesi Maluku saat ini menunggu arahan teknis pelaksanaan dari Kantor Pusat, termasuk sasaran vokasi yakni pekerja formal atau informal

Paparan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku

Data ABK di Provinsi Maluku (data belum terkumpul) yang ada adalah data dari ABK Kapal Perintis yang dikelola PT. PELNI Cabang Ambon : 112 orang, ABK Kapal BUMD Panca Karya : 115 orang, dan ABK Kapal PT. ASDP Cabang Ambon : 167 orang. Saat ini, belum ada program peningkatan kualitas SDM ABK, yang ada selama ini adalah Diklat Vokasi dan Diklat Pemberdayaan Masyarakat agar masyarakat mendapatkan sertifikat BST dan buku pelaut.

Paparan Kepala BLK Ambon

Bantuan pemda bagi peserta pelatihan dari luar Maluku

Sampai tahun 2019, BLK Ambon hanya melatih peserta yang berada di dalam daerah Maluku di luar wilayah Kota Ambon, BLK Ambon melalui program pelatihan berbasis kompetensi untuk jenis pelatihan BOARDING telah mendatangkan para siswa dari daerah – daerah Kabupaten (10 Kabupaten dan 1 Kota yang ada di Provinsi Maluku) Bagi peserta pelatihan disediakan (bagi peserta pelatihan berbasis kompetensi) transportasi, akomodasi, konsumsi, perlengkapan pelatihan, seragam siswa. Uang saku. Selain itu, bantuan juga diberikan bagi

peserta pelatihan MTU dimana pelatihan dilaksanakan menjangkau 11 kabupaten/kota yang ada di provinsi Maluku.

Kerjasama BLK dengan instansi terkait lain dalam upaya memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Maluku dan rencana pengembangan program kerja di BLK Ambon

Kerjasama BLK Ambon dengan instansi terkait di Provinsi Maluku nyata dari adanya pembentukan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri yang dibentuk pada tanggal 28 September 2017 di BLK Ambon yang melibatkan berbagai asosiasi industri yang ada di Kota Ambon beserta dengan beberapa instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku, Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, Sekolah Menengah Kejuruan yang ada di Kota Ambon, dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (42 industri yang tergabung didalamnya), serta berbagai asosiasi yang ada di provinsi Maluku antara lain APINDO, HILLSI (Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia), LPKS (Lembaga Pelatihan Kerja Swasta), PHRI (Himpunan Hotel Dan Restoran Indonesia), KADIN dan lainnya. Serta pembentukan Skill development Center pada tanggal 9 Desember 2019 di Aula Perikanan Nusantara Ambon. Pembentukan SDC Maluku dan SDC Kota Ambon yang dilantik oleh Wakil Gubernur Maluku dan Sekda Provinsi Maluku SDC melibatkan akademisi, industri, instansi pemerintah, LPKS.

Paparan APINDO

Persoalan Peningkatan Kualitas sumber Daya Manusia berujung pada kualitas Produktifitas pekerja di perusahaan merupakan kebutuhan perusahaan oleh karena itu, Apindo sebagai asosiasi menghimpun para Pengusaha, punya konsen terhadap peningkatan sumber daya manusia atau pekerja. Berkaitan dengan itu, kegiatan peningkatan sumber manusia berupa pelatihan/ketrampilan yang dilakukan oleh perusahaan yang ada di Maluku khusus di kota Ambon pada skala Mandiri sangat kurang dan terbatas pada perusahaan Otomotif, Parawisata (perhotelan berbintang), konstruksi, listrik dll. Tetapi skala kerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) maupun Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Cukup banyak. Ketrampilan yang dibutuhkan saat ini ketrampilan jasa pelayanan (pramuniaga) dan Otomotif. Peran Apindo Maluku dalam mendukung program peningkatan pelatihan Sumber daya manusia selamat ini berjalan dengan baik dengan Kementerian Tenaga Kerja RI dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku serta Balai Latihan Kerja Ambon, Apindo dengan stakeholder lain terlibat dalam Program Pemagangan dan juga sebagai Narasumber dalam kegiatan dimaksud dan acara-acara sosialisasi maupun undangan lainnya. Berkaitan dengan bantuan Apindo terhadap peserta pelatihan BLK menjadi wirausaha, Apindo sebatas memberikan motivasi kepada peserta BLK menjadi seorang Wirausaha.

Paparan perwakilan serikat pekerja dan asosiasi pekerja anak buah kapal

Pada tahun 2012 telah diikutsertakan sebanyak 50 (lima puluh) orang Anak Buah Kapal pada kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Ambon. Mengingat kebutuhan lapangan kerja yang cukup tinggi di Provinsi Maluku, sehingga masyarakat sangat berantusias dalam mengikuti program-program pelatihan yang berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Balai Latihan Kerja. Kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam pemenuhan kompetensi pekerja telah terjalin sejak tahun 2017

III TEMUAN-TEMUAN

Dari hasil pertemuan yang dilakukan, maka didapat beberapa temuan-temuan berdasarkan data yang disampaikan semua pihak, yaitu:

1. Dalam kunjungan lapangan ke BLK Ambon, dimana ditemukan kondisi gedung dengan beberapa bagian terlihat rusak akibat gempa bumi yang terjadi November 2019 lalu sehingga perlu perbaikan. Begitu juga di beberapa bagian ruangan pelatihan seperti pelatihan computer, tidak didukung dengan fasilitas pendingin, sementara computer memerlukan ruangan dingin sehingga tidak merusak peralatan computer tersebut. Selain itu, dengan ruangan yang cukup panas, peserta pelatihan menjadi kurang nyaman.
2. Maluku merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi sumber daya alam di bidang perikanan dan kelautan yang melimpah dan kota ambon sensiri telah mendapat sebutan kota music dunia oleh UNESCO. Namun potensi ini belum dimanfaatkan dalam membuka lapangan pekerjaan baru oleh pemerintah daerah, seperti belum adanya bidang music dan perikanan dalam salah satu kurikulum pelatihan di BLK Ambon. Oleh sebab itu diharapkan pemerintah daerah memiliki inovasi dalam mengelola kelebihan alam yang ada di Maluku yang nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu cara membuka lapangan pekerjaan.
3. Melihat bidang kejuruan pada BLK Ambon, belum ada yang berorientasi pada industry music, perikanan dan kelautan dan pariwisata. Seharusnya pemerintah daerah bersama pemerintah pusat bekerjasama dalam memanfaatkan potensi di provinsi Maluku yang luar biasa sehingga dapat dikembangkan melalui keberadaan kejuruan dan peralatan yang ada di BLK Ambon.
4. Orientasi pembangunan ketenagakerjaan di provinsi Maluku lebih ke daratan dan bukan ke laut sementara provinsi Maluku merupakan daerah kepulauan. Pemerintah daerah

diminta dapat melihat kebutuhan dan keunggulan dari daerahnya yang kemudian dapat dituangkan dan menjadi salah satu fokus dan prioritas pelatihan di BLK. SDM di provinsi Maluku seharusnya dipersiapkan untuk dapat membangun kelautan, dan pariwisata.

5. BPJS Ketenagakerjaan diminta dapat
6. Output dari pelatihan yang diselenggarakan BLK Ambon, tercatat sebanyak 42 persen peserta pelatihan yang terserap dalam dunia usaha, selebihnya alumni BLK memilih menjadi wirausaha. Sehingga BLK dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan taraf hidup peserta pelatihan dan masyarakat.
7. Pelatihan berbasis kompetensi dasar sangat dibutuhkan dunia usaha sesuai minat dan bakat peserta pelatihan di Provinsi Maluku, oleh sebab itu BLK Ambon telah memberikan pelatihan tersebut secara gratis kepada peserta pelatihan, namun untuk terus memberikan pelatihan tersebut, BLK Ambon membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
8. Peserta pelatihan di BLK Ambon belum terserap maksimal di dunia kerja oleh karena masih kurangnya anggaran yang dibutuhkan dalam penambahan kuota peserta pelatihan. Terkait masalah kurangnya anggaran, diharapkan BLK Ambon terus aktif melakukan kerjasama dengan perusahaan atau pihak lain yang dapat menyumbang peralatan yang dibutuhkan sehingga dana yang sebelumnya dialokasikan untuk peralatan dapat dialihkan ke peserta yang akan dilatih sehingga serapan peserta pelatihan di BLK dapat maksimal.
9. Kehadiran BLK Ambon sangat penting di provinsi Maluku dalam menjawab persoalan pengangguran yang cukup tinggi, sebab BLK Ambon dapat menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai. Hal ini terlihat dari banyaknya peserta pelatihan yang cukup banyak peminat dan lulusan BLK Ambon yang juga cukup banyak terserap di dunia usaha dan memilih membuka usaha sendiri.
10. Di lapangan, masih banyak BLK Komunitas yang belum termanfaatkan karena ketiadaan peralatan. Oleh sebab itu diharapkan pemerintah daerah untuk aktif melakukan kerjasama dengan BUMN dan BPJS Ketenagakerjaan sehingga dapat membantu menyediakan peralatan yang dibutuhkan oleh BLK-BLK terutama BLK Komunitas sehingga dapat dimanfaatkan.
11. BLK Ambon membutuhkan penambahan instruktur untuk pelatihan perikanan dan kelautan sehingga dapat mempersiapkan tenaga kerja di sector perikanan dan kelautan.

IV. KESIMPULAN/REKOMENDASI

1. KOMisi IX DPR RI mengapresiasi kondisi BLK Ambon secara umum yang sudah memiliki peralatan pendukung pelatihan yang cukup memadai dan up to date, dan

cukup ramai peminat. Namun kondisi tersebut perlu dibangun kerjasama antara BLK dengan pemerintah daerah, dengan asosiasi industri seperti HIPMI dan APINDO dan pihak lainnya guna memaksimalkan output dari penyelenggaraan pelatihan di BLK.

2. Provinsi Maluku sebagai daerah kepulauan dengan potensi kelautan dan maritime yang besar, oleh sebab itu perlu memanfaatkan kearifan local yang ada seperti industry perikanan, dan di dukung Sumber Daya Manusia yang dapat memanfaatkan kearifan local tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Komisi IX DPR RI mendorong keberadaan BLK khusus di bidang Maritim dan perikanan sehingga dapat mendukung pengembangan potensi maritime dan kelautan provinsi Maluku.
3. KOMisi IX DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan turut serta memberikan bantuan peralatan yang dibutuhkan BLK-BLK komunitas sehingga keberadaan BLK Komunitas dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.
4. KOMisi IX DPR RI meminta agar pelatihan vokasi yang diselenggarakan di BLK Ambon tidak saja untuk menyiapkan SDM yang siap kerja, namun juga mengembangkan atau memperluas peluang kerja sehingga peserta pelatihan vokasi menjadi wirausaha baru yang mandiri.
5. Komisi IX DPR RI mendorong BLK Ambon menyelenggarakan pelatihan bidang music, khususnya BLK Komunitas yang diharapkan diarahkan pada bidang music, mengingat penetapan kota Ambon sebagai *the city of music* oleh UNESCO.
6. Selain bidang music, KOMisi IX DPR RI berharap BLK Ambon dilengkapi dengan pelatihan bidang pariwisata dan perhotelan mengingat provinsi Maluku yang dikenal dengan keindahan alamnya. Sehingga dapat membuka lapangan kerja di bidang pariwisata.
7. BLK Ambon juga diharapkan mengembangkan pelatihan pada industry perikanan dan kelautan mengingat provinsi Maluku merupakan wilayah kepulauan dengan potensi kelautan dan sumber daya alam perikanan yang melimpah, sehingga dapat menciptakan wirausaha baru di bidang industry perikanan.
8. Komisi IX DPR RI mendukung pemerintah daerah provinsi Maluku untuk memperjuangkan pendirian akademi perikanan dan kelautan mengingat provinsi Maluku sebagai kota maritime dan kepulauan yang kaya akan hasil laut dan ikan, sehingga akademi ini nantinya diharapkan dapat mencetak SDM pelayaran dari angkatan kerja muda Maluku.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja spesifik ini disampaikan.

Jakarta, Februari, 2020

**TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI IX DPR RI KE PROVINSI MALUKU
KETUA TIM,**

Ttd